

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

LAKIP ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2009, yang diformulasikan dari hasil kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini dikarenakan setiap SKPD dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holder*).

LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Sleman tahun 2009 dilaksanakan dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2009. Penetapan Kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2009 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. Materi Penetapan Kinerja Tahun 2009, disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) APBD Tahun Anggaran 2009.

LAKIP Kabupaten Sleman Tahun 2009 disusun berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, sedangkan penyusunannya sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2009 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran
1	Meningkatnya efisiensi birokrasi	2	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan masyarakat	2	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	1	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya informasi dan komunikasi manajemen pemerintahan dan akses pemanfaatannya	4	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya paritipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan daerah	2	Berhasil
6	Menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	4	Sangat Berhasil
7	Meningkatnya produksi barang dan jasa	2	Tidak Berhasil
8	Meningkatnya pemasaran	1	Berhasil
9	Meningkatnya Investasi	1	Berhasil
10	Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perhubungan	3	Sangat Berhasil
11	Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengairan	3	Sangat Berhasil
12	Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman	3	Sangat Berhasil

13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Sangat Berhasil
14	Meningkatnya kualitas pendidikan	2	Sangat Berhasil
15	Meningkatnya derajat kesehatan	5	Sangat Berhasil
16	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	2	Sangat Berhasil
17	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas hidup PMKS	3	Sangat Berhasil

Dari hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Sasaran yang ditetapkan sebanyak 17 sasaran dengan hasil capaian kinerja 13 sasaran mencapai angka diatas 85% sampai dengan 100%, sedangkan 3 sasaran berada pada angka 70% sampai dengan kurang dari 85% serta 1 sasaran berada pada angka dibawah 55%
2. Dari 17 sasaran telah ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 41 indikator sasaran dengan hasil capaian sebagai berikut:
 - 15 indikator kinerja sasaran mencapai angka di atas 100%.
 - 17 indikator kinerja sasaran mencapai angka di atas 85% sampai dengan 100%.
 - 4 indikator kinerja sasaran capaiannya antara 70% sampai dengan <85%.
 - 3 indikator kinerja sasaran capaiannya antara 55% sampai dengan <70%.
 - 2 indikator kinerja sasaran capaiannya dibawah 55%

Dari 41 indikator kinerja sasaran terdapat 15 indikator yang capaian kerjanya lebih dari 100%, yaitu:

1. Instansi daerah yang telah menerapkan ISO
2. peningkatan PAD
3. Peningkatan akses informasi masyarakat
4. Instansi yang memiliki jaringan berbasis komputer
5. Kelengkapan jenis data
6. Menurunnya kejadian Pekat
7. Bendung dengan kondisi baik
8. Prasarana dan sarana PBA dengan kondisi baik
9. Rata-rata lama sekolah (tahun)

10. Usia harapan hidup
11. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
12. Penyerapan lulusan pasca pendidikan dan pelatihan
13. Proporsi KK miskin terhadap jumlah KK
14. Proporsi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap
banyaknya penduduk
15. Menurunnya angka pengguna narkoba